



Hadar Nafis Gumay

Pendiri dan Peneliti Senior Netgrit

Mengawal Hasil Pemilu

Pada 20 Maret lalu, Kawal Pemilu dan Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) meluncurkan gerakan Kawal Pemilu Jaga Suara (KPJS) dalam rangka menjaga suara masyarakat pada Pemilu 2019. Tujuannya gerakan ini hanya satu, memastikan suara yang dicoblos rakyat dari TPS tetap sama ketika masuk rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara nasional.

Pendiri Netgrit, **Hadar Nafis Gumay**, menuturkan, dengan menjaga suara rakyat, berarti menjaga pilihan rakyat menempati posisinya. Dia yang dipilih rakyat dari bawah seharusnya sama dengan hasil pemilu di tingkat nasional. Bagaimana mereka para relawan KPJS ini bekerja? Hadar menyempatkan waktu berbincang dengan wartawan *Republika*, **Dian Erika Nugraheny**, terkait realisasi gerakan ini pada Pemilu 2019 mendatang.

Satu hal yang pasti, gerakan ini didukung dengan teknologi informasi. Hal itu memungkinkan masyarakat luas menjadi relawan sekaligus melakukan pengecekan langsung terhadap kebenaran hasil suara pemilu. Berikut petikannya:

Apa sebenarnya gerakan KPJS?

Gerakan KPJS ini menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan publik mengecek kebenaran jumlah suara yang didapat untuk level pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan anggota DPR. Kemudian, nanti juga memungkinkan untuk mengumpulkan tambahan data berupa foto hasil pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pemilihan anggota DPD. Secara garis besar, KPJS menggabungkan *technical skills* dari *Kawal Pemilu.org* dan *technical expertise* Netgrit untuk menjaga suara masyarakat dalam lingkup besar.

Gerakan ini memerlukan partisipasi dari jutaan masyarakat Indonesia untuk mengambil foto formulir C-1 plano (formulir yang berisi hasil penghitungan suara) dan mengunggah fotonya di situs upload.kawalpemilu.org. Masyarakat yang menjadi relawan dalam gerakan ini tidak boleh terafiliasi dengan peserta pemilu manapun. Relawan juga terlibat secara sukarela.

Apakah tujuan KPJS ini mulai awal hingga akhir pemilu?

Jadi, kami ini *kan* memantau dan bukan sekadar menyampaikan apa yang kami foto tanpa peduli apa isinya. Namun, justru kami akan memastikan bahwa isi yang ada di dalam sana adalah isi yang benar. Dengan kami melakukan publikasi, kalau ada yang mau mengubah, bisa nanti kelihatan atau terpantau. Dengan kegiatan ini, ada proses menjaganya ya. Ketiga, ada kegiatan ini dan kami memublikasikan hasilnya, maka itu sebetulnya sudah sesuatu peringatan yang cukup kuat kepada mereka yang mau mencoba atau berniat mau mengubah hasil pemilu nantinya. Jangan dibayangkan nantinya setelah dari TPS, menuju proses rekapitulasi di kecamatan, kemudian nanti di kecamatan akan kongkalikong untuk diubah-ubah. Dengan adanya pemantauan dan publikasi ini, akan gampang sekali diketahui

kecurangannya.

Sebab, sebetulnya kegiatan teman-teman ini adalah menjaga suara yang sudah diberikan, dihitung, disimpulkan di TPS itu agar tidak bergeser. Harus tetap sama sejak TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Jadi, keaslian hasil pencoblosan harus terjaga. Sehingga pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa inilah presiden yang memang sebab ada data dari TPS yang terus sama. Inilah DPR, DPD yang menang sebab terus sama. Jaga suara itu artinya ya menjaga apa yang telah dipilih di bawah. Seperti apa adanya, itu akan tetap seperti itu. Sebagaimana hasil akhirnya itu yang kami maksud.

Bagaimana relawan bekerja?

Relawan bisa menggunakan ponsel pintar mereka, komputer dan koneksi internet pribadi untuk mengambil foto formulir C-1 plano di tempat pemungutan suara (TPS). Kemudian, cara kerjanya sederhana, yakni memantau TPS, mengambil foto C-1 plano kemudian mengunggah atau *upload* hasil foto itu. Jadi, ada tiga kata kunci, yakni pantau, foto, dan *upload*. Hal ini bisa dilakukan setelah proses penghitungan suara di TPS selesai. Foto yang diambil, yakni formulir C-1 plano dari pemilihan presiden-wakil presiden (2 halaman) dan C-1 plano pemilihan anggota DPR (18 halaman).

Meski sederhana, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan, yakni pastikan fotonya jelas dan datanya tidak tertutup. Kemudian, unggah dengan memasukkan ke upload.kawalpemilu.org dan *login* dengan akun *Facebook* untuk *upload* fotonya satu per satu. Nanti hasil pergerakan angka dari foto tersebut bisa dipantau di situs www.kawalpemilu.org. Jadi, caranya mudah dan tidak perlu menjadi praktisi teknologi informasi untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan ini.

Jadi, sasaran kegiatan ini pertama adalah TPS?

Bisa dimulai dari TPS. Pada Pemilu 2019 terdapat 809.500 TPS yang suaranya perlu dijaga. Kali ini kami mengupayakan untuk mengumpulkan data primer dalam bentuk foto C-1 plano dari masing-masing TPS. Sebab, formulir C-1 plano adalah data pemilu paling dasar dan pengumpulan fotonya adalah cara terbaik untuk menjaga suara rakyat di Pemilu 2019.

Apa syarat menjadi relawan?

Relawan yang terlibat dalam gerakan ini tidak boleh terafiliasi dengan peserta pemilu manapun. Relawan juga terlibat secara sukarela dan berpihak pada kebenaran data empiris. Nanti teman yang kami ajak adalah orang-orang yang punya visi sama. Kemudian, memiliki sarana pendukung, yakni ponsel, pulsa, jaringan internet. Jadi, itulah model dari kegiatan kita dan gerakan ini gerakan yang sukarela. Kegiatan ini adalah pemantauan dan kami semua tidak punya kepentingan politik. Siapa pun yang menenangkan pemilu nanti, kami akan menghormati sepanjang proses pemilihan ini demokratis.

Apakah setelah melakukan foto dan unggah, relawan juga menghitung hasil perolehan suara?

Jadi, ada dua kelompok relawan. Pertama, seseorang yang memang kami rekrut karena kami percaya dia nonpartisan. Dia nanti bisa sekaligus menjadi moderator atau melakukan tugas melakukan tabulasi data (menyusun data hasil dari unggahan). Caranya, setelah ada foto C-1 plano yang masuk, bisa langsung diperiksa oleh dia dan ditabulasi secara digital.

Relawan kedua adalah mereka yang cukup hanya melakukan pantauan di TPS, kemudian mengambil foto dan mengunggah foto tersebut. Dia hanya bisa melakukan tiga hal itu. Tidak bisa melakukan *entry* data atau tabulasi tadi. Nantinya dalam prosesnya pun kami pastikan dulu foto yang mereka unggah adalah gambar



Jaga suara itu artinya ya menjaga apa yang telah dipilih di bawah. Seperti apa adanya, itu akan tetap seperti itu.

yang benar, tidak ada kesalahan apa pun dan riil. Tujuannya supaya ada kepastian bahwa mereka tidak melakukan manipulasi data.

Data yang diunggah itu hasil pilpres dan pileg DPR saja?

Iya. Sebenarnya pemilihan yang lain pun ingin kami rangkum hasilnya. Namun, ini waktu sangat terbatas. Juga bergantung pada gambar atau hasil foto yang masuk. Di sistem kami foto manapun yang dikirimkan relawan tidak menjadi soal. Dia mau kirim satu, tidak apa-apa. Relawan datang terlambat dan hanya sebagian rekap data DPRD dan DPD pun tidak masalah. Ada yang sangat rajin sekali semuanya difoto, itu bagus sekali. Kemudian ada yang di TPS tertentu dia ambil dari besok paginya dengan cara melihat semua data yang dipampangkan di kantor kelurahan. Tidak apa-apa itu bagus. Semua itu kami buka kami beri kesempatan.

Dari data semua yang masuk itu kami mau memprioritaskan tabulasi untuk pilpres dan DPR saja. Itu pun yang DPR adalah angka perolehan parpol saja, bukan calegnya. Sebenarnya kami sangat ingin merekapitulasi 100 persen hasil pemilu ini ada kami kumpulkan. Jadi, misalnya untuk pilpres bisa dapat 80 persen data. DPR bisa dapat 60 persen dan cenderung yang lain-lain lebih sedikit *kan*, tapi kami akan kerjakan dan akan cari data lagi. Misalnya, data dari laman resmi KPU sehingga kami akan kombinasikan da-

Prihatin dengan Angka Golput

OLEH DIAN ERIKA NUGRAHENY

Hadar Nafis Gumay sudah aktif di dunia kepemiluan sejak pertengahan 1990-an. Saat itu, pria kelahiran Jakarta, 10 Januari 1960 ini sudah menjadi pemantau pemilu sejak penghitungan suara dilakukan oleh MPR. Hadar yang sempat mengenyam pendidikan di Jakarta dan Amerika ini pernah menjadi dosen Ilmu Sosiologi di FISIP UI. Dirinya menjadi staf pengajar sejak 1991-2007.

Namun, setelah Pemilu 1999, dia tampaknya mulai mengalihkan perhatian kepada bidang kepemiluan. Menurut Hadar, partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat tinggi pada 1999. Dia mengenang saat itu masih banyak organisasi masyarakat yang terlibat dalam pemantauan pemilu. "Organisasi masyarakat sipil, LSM, NGO, dan seterusnya itu memantau dan jumlahnya itu ratusan ribu. Saya sendiri waktu itu sempat memimpin University Network for Free and Fair Election (UNFREL), ada forum rektor juga dan sebagainya," ujar Hadar.

Setelah Pemilu 1999, Hadar mendirikan lembaga advokasi CETRO (Centre for Electoral Reform). Dia bercita-cita mewujudkan proses pemilu yang benar, jujur, dan adil di Indonesia. Namun, lanjutnya, pada pemilu 2004, 2009, 2014 jumlah partisipasi masyarakat semakin sedikit. Melihat kondisi partisipasi masyarakat yang kian menurun di pesta demokrasi lima tahunan ini, Hadar mengaku prihatin. Bapak dua anak ini pun bertekad ingin menaikkan tingkat partisipasi dan mengurangi golongan putih (golput) di pemilu. Selanjutnya, ia memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017.



Hadar yang kemudian lolos menjadi komisioner KPU sempat menjadi penyelenggara Pemilu 2014. Melihat partisipasi masyarakat yang makin turun, dia ingin kegiatan KPJS bisa menumbuhkan keinginan masyarakat untuk mengawasi pemilu. Menurut dia, masyarakat seharusnya bukan hanya sekadar hadir menggunakan hak pilihnya di TPS. "Hadir di TPS penting untuk mencoblos. Namun, ayo kita bersama-sama memastikan bahwa memastikan suara itu murni terjaga. Mari kita sama-sama

menjaganya itu melalui kegiatan ini," ujarnya.

Kini, selain aktif mengawal isu kepemiluan melalui Netgrit, Hadar juga masih menjadi pembicara di sejumlah diskusi tentang kepemiluan. Kiprahnya yang menonjol selama menjabat sebagai komisioner KPU membuat banyak pihak masih menjadikannya salah satu rujukan ketika berbicara tentang pemilu. Dirinya pun sering dimintai masukan tentang persoalan pemilu baik oleh penyelenggara maupun pengawas pemilu. ■ **ed:** agus raharjo

tanya.

Bagaimana dengan pemilu di luar negeri?

Sebenarnya kami berencana membuat slot untuk mengunggah datanya. Namun, kami memang belum mendapatkan data detail untuk pemilu luar negeri. Kalau di dalam negeri *kan* sudah kelihatan betul TPS di kecamatan ini, desa ini punya berapa. Nah, data yang kami dapatkan di TPS luar negeri belum seperti itu. Kalau bisa didapat data perinci maka kami akan bisa di TPS luar negeri. *Kan* walau bagaimanapun ada dua juta suara WNI di luar negeri yang suaranya besar dan itu perlu kita kawal bersama.

Sistem IT yang digunakan oleh KPJS ini sudah lebih sederhana dibandingkan dengan sistem kawal hasil pemilu yang lain?

Benar. Jadi, kami mendesain sistem ini sudah merupakan hasil evaluasi dari berbagai pengalaman sehingga bisa lebih mudah. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai rencana. Tugas relawan umum misalnya begitu datang ke TPS, *udah* selesai C-1 plano, foto dulu, semua udah lengkap lalu *udah* bagus fotonya, kemudian sudah masuk di portal *kawalpemilu.org*. Di situ lihat alamat TPS dia. Jadi, menurut saya ya jelas. Kecuali dia berada di jaringan yang *ga* bagus. Namun, kalau *ga* bagus ya dia pulang dulu bisa. Baru di-*upload*. Yang penting *udah* punya foto, TPS yang bersangkutan.

■ **ed:** agus raharjo